

BAB III

ALAT ANALISIS

Alat analisis yang digunakan dalam memorandum hukum ini adalah interpretasi atau penafsiran terhadap ketentuan perundang-undangan. Penafsiran adalah menjalankan suatu undang-undang setelah undang-undang itu dijelaskan atau menjalankan kaedah yang oleh undang-undang tidak dinyatakan dengan jelas¹. Dengan demikian jelas bahwa interpretasi adalah penafsiran terhadap teks undang-undang dan masih berpegang kepada bunyi teks undang-undang tersebut.

Tujuan penafsiran terhadap undang-undang adalah “untuk menentukan arti sesungguhnya dari keputusan pembuat undang-undang dalam mencari kehendak pembuat undang-undang yang dinyatakan tidak jelas.

Dalam memorandum hukum ini, interpretasi yang dilakukan menggunakan tehnik subsumtif dan penafsiran gramatikal.

Penafsiran subsumtif didalam buku Sudikno :²

“penerapan suatu teks undang-undang terhadap kasus in-kongkrito dengan belum memasuki taraf penggunaan penalaran yang lebih rumit, tetapi sekedar menerapkan silogisme.

Penafsiran Gramatikal didalam buku C.S.T. Kansil :³

“pada penafsiran gramatikal ketentuan yang terdapat diperaturan perundang-

¹ Wibowo Turnady, *Penafsiran Hukum*, www.jurnalhukum.com, diakses pada tanggal 30 Agustus 2015

² Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Bandung, PT. Aditya Bakti, 2001, Hlm. 14-16

³ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Balai Pustaka, 2002, Hlm. 36.

undangan ditafsirkan dengan berpedoman pada arti perkataan menurut tata bahasa atau menurut kebiasaan.”

Tujuan penafsiran terhadap suatu undang-undang adalah untuk menentukan arti sesungguhnya dari keputusan pembuat undang-undang dalam perumusan undang-undang.